



Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Kasus Pemberontakan G30-SPKI

Anggita Nur' Alifah Kunaefi^{a,1}, Fran Sisko^{b,2}, Mohhamad Sobari^{c,3}, Siti Almaidah^{d,4}, Yudhistira Wicaksono^{e,5},
Siti Komariah^{f,6}

^{acde} (Pendidikan Fisika: Universitas Pendidikan Indonesia), Bandung, Indonesia

^b (Pendidikan Fisika: Universitas PGRI Silampari), Palembang, Indonesia

^f (Pendidikan Sosiologi: Universitas Pendidikan Indonesia), Bandung, Indonesia

Correspondence: E-mail: anggitanurkunaefi@upi.edu

ABSTRACT

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Di Indonesia sendiri terdapat satu kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi, yaitu pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau dengan nama lain yaitu G30S-PKI. Meskipun peristiwa ini sudah lama terjadi, namun ini masih menjadi polemik dalam bangsa Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kajian pustaka sehingga diperoleh hasil analisis terkait faktor dan solusi dari permasalahan ini. Faktor penyebab G30S-PKI terjadi diantaranya (1) Dominasi ideologi Nasakom, (2) Pertentangan antara PKI dan TNI, (3) Keterlibatan pihak Amerika Serikat, (4) Kejadian di Lubang Buaya, (5) Propaganda anti-PKI, (6) Ketidakstabilan politik, (7) Keterlibatan intelijen asing, (8) Kegagalan penyidikan independent, (9) Kekerasan massal, (10) Pengaruh agama. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk mencegah peristiwa ini terulang Kembali adalah dengan mempertahankan ideologi Pancasila.

© 2025 Kantor Jurnal dan Publikasi UPI

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 3 Apr 2024

First Revised 15 Agst 2025

Accepted 4 Sep 2025

First Available online 8 Sep 2025

Publication Date 14 Sep 2025

Keyword:

G30-SPKI, Pelanggaran HAM, Pemberontakan

1. PENDAHULUAN

Hak asasi manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sejak dalam kandungan. Hak ini harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Perlindungan yang diberikan oleh negara sejatinya merupakan bagian dari penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, "semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hak dan martabat. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani, dan harus bersikap terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan."

Deklarasi Universal Hak Asasi manusia berisi tentang apa saja yang menjadi hak dari hak asasi manusia, yaitu hak asasi manusia untuk semua, kebebasan dan kesetaraan, hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perbudakan, hak untuk bebas dari tindak penyiksaan, hak atas kesetaraan di mata umum, dan hak akses terhadap hukum. Deklarasi ini diproklamkan sebagai standar umum pencapaian kesejahteraan bagi semua orang dan semua bangsa. Deklarasi ini mencakup semua hak yang terdapat dalam hak sipil-politik maupun hak ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam pelaksanaannya negara dituntut untuk melakukan segala upaya untuk memajukan hak asasi manusia, baik secara normatif maupun administratif. Negara merupakan personifikasi yang abstrak dan pemerintahlah yang berposisi sebagai entitas hukum yang mewakili kepentingan-kepentingan negara. Sebagai entitas hukum yang mewakili kepentingan-kepentingan negara, pemerintah melakukan suatu perbuatan melalui perantara orang yang ada di dalamnya yang bertindak dalam kapasitas sebagai aparatur negara (Kasalang, 2012: 331).

Saat ini negara tidak hanya dituntut untuk menjaga keamanan, ketertiban, dan perdamaian dunia tetapi juga keamanan bagi manusia (*human security*) di manapun dan kapanpun manusia berada. Keamanan terhadap manusia merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia akan harkat dan martabatnya sehingga manusia yang berhak untuk hidup dalam kebebasannya, berhak untuk mendapat perlindungan, bebas dari rasa takut, ancaman, penyiksaan, diskriminasi, dan lain-lain. (Anggriani, 2017: 319). Oleh karena itu penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua negara, namun tetap ada pengecualian terhadap penegakan hak asasi manusia ketika kondisi suatu negara dalam keadaan darurat yang disebut dengan hak yang dapat dikecualikan.

Di Indonesia sendiri terdapat satu kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi, yaitu pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau dengan nama lain yaitu G30S-PKI. Tragedi berdarah yang terjadi pada tahun 1965 yang mengakibatkan gugurnya enam Jenderal dan satu Perwira Pertama Militer Indonesia dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Peristiwa ini melibatkan kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan dimulainya kampanye anti-komunis yang sangat brutal (Pratama, F. Y. 1965).

Meskipun G30S-PKI sudah lama terjadi, namun peristiwa ini tetap menjadi bagian penting bagi Indonesia dan penting untuk dicatat bahwa interpretasi G30S-PKI ini masih menjadi polemik perdebatan di dalam bangsa Indonesia. Setelah kejadian ini, PKI dianggap sebagai organisasi yang terlarang di Indonesia. Maka dari itu, metode yang digunakan dapat menemukan apa saja yang menjadi faktor penyebab peristiwa ini terjadi dan solusi apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana riset yang dilakukan bersifat deskriptif dan data yang digunakan merupakan data yang bersifat kualitatif atau dapat diartikan bahwa data yang digunakan tidak terdiri atas angka-angka melainkan berupa gambaran serta kata-kata. Penelitian ini dapat digolongkan pada penelitian pustaka, yakni segala upaya yang dilakukan untuk memperoleh dan menghimpun informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kajian ini memuat beberapa teori yang saling berkaitan satu sama lain yang didukung oleh data-data dari sumber pustaka yang mendukung khususnya mengenai kajian tafsir. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan tasfir tematik. Data-data yang ditemukan kemudian dibahas dan dianalisis secara induktif untuk menghasilkan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

G30S-PKI adalah singkatan dari Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965 yang mengakibatkan gugurnya enam jenderal serta satu orang perwira pertama militer Indonesia dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Peristiwa ini melibatkan kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan dimulainya kampanye anti-komunis yang sangat brutal (Pratama, F. Y. 1965).

Berikut merupakan faktor-faktor yang menjadi penyebab mengapa G30S-PKI terjadi, diantaranya:

1. Dominasi Ideologi Nasakom

Ideologi Nasakom atau Nasionalisme, Agama, dan Komunisme pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno diberlakukan dengan seimbang sejak masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965). Pemberlakuan ideologi Nasakom menjadi jalan PKI untuk mengganti ideologi Pancasila menjadi Komunis di Indonesia. Ideologi inilah yang akan membuat Indonesia menjadi komunis, dan juga ideologi komunis lah yang akan membuat rugi negara kita. Ibarat sebuah racun maka ideologi ini merupakan sebuah racun yang berdampak negatif terhadap badannya (Setyonugroho, E. A. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Blunder Politik Soekarno).

2. Pertentangan antara PKI dan TNI

Hubungan kurang baik antara PKI dan TNI menjadi salah satu faktor lain yang mendorong adanya G30S-PKI. Ketidakharmonisan TNI dan PKI diawali oleh dibentuknya angkatan kelima yang diinisiasi PKI. Ketegangan antara kelompok militer yang loyal kepada Presiden Sukarno dan kelompok yang ingin menggulingkannya. Perselisihan internal di militer

menciptakan peluang bagi kelompok yang mendukung kudeta untuk melaksanakannya (Sidqi, S. Y. N. 2008).

3. Keterlibatan Pihak Amerika Serikat

Pengaruh negara-negara asing dalam mendukung atau melawan peristiwa G30S/PKI. Beberapa negara, seperti Amerika Serikat, diduga terlibat dalam mendukung kelompok militer anti-komunis dalam menjatuhkan PKI. Karena telah ditemukan banyak dokumen dari FBI CIA yang mengungkapkan keterlibatan Amerika Serikat dalam peristiwa G30S/PKI. Meskipun Amerika Serikat merupakan negara anti-komunis (Wiharyanto, K. 2010).

4. Kejadian di Lubang Buaya

Peristiwa utama dalam G30S/PKI terjadi di Lubang Buaya, di mana enam perwira militer tinggi Indonesia diculik dan kemudian dibunuh. Pembunuhan ini menjadi titik awal dari peristiwa G30S/PKI dan memicu respons keras dari pemerintah dan militer (Adriyanto, A. 2016).

5. Propaganda anti-PKI

Penyebaran propaganda anti-PKI oleh kelompok militer dan pemerintah untuk membujuk rakyat Indonesia untuk mendukung tindakan mereka. Propaganda ini menciptakan ketakutan dan kebencian terhadap PKI, yang menguatkan dukungan terhadap kudeta (Ikhsan A.F. dan Diyah A.K. 2018).

6. Ketidakstabilan Politik

Ketidakstabilan politik yang melanda Indonesia selama periode ini, termasuk ketegangan antara Presiden Soekarno dan kelompok militer, menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya peristiwa G30S/PKI. Ketidakstabilan politik menciptakan kebingungan dalam pemerintahan, yang dieksploitasi oleh para perwira militer yang mendukung kudeta (Setyahadi, M. M. 2018).

7. Keterlibatan Intelijen Asing

Adanya keterlibatan agen intelijen asing dalam mempengaruhi perkembangan peristiwa G30S/PKI. Dugaan keterlibatan intelijen asing dalam mendukung kelompok anti-komunis atau memantau perkembangan peristiwa ini turut memengaruhi dinamika konflik (Permata, H. 2015).

8. Kegagalan Penyelidikan Independen

Kegagalan penyelidikan independen yang memungkinkan narasi resmi tentang G30S/PKI untuk mendominasi. Kurangnya penyelidikan independen membuat sulit untuk mengungkapkan kebenaran sebenarnya tentang peristiwa tersebut (Khatami, M. I., & Kurnia, N. 2022).

9. Kekerasan Massal

Munculnya kekerasan massal oleh kelompok anti-komunis terhadap simpatisan PKI dan kelompok minoritas. Kekerasan ini menciptakan atmosfer ketakutan dan teror, memperparah konflik dan memicu pembantaian massal (Patra, H., Anatona, A., & Narny, Y. 2022).

10. Pengaruh Agama

Pengaruh agama dalam membujuk atau mengarahkan sikap masyarakat terhadap PKI. Beberapa pemimpin agama memobilisasi massa untuk melawan PKI dengan alasan anti-komunis dan anti-ateisme (Nazra, E. R. C., & Darmawan, B. 2023).

Upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk mencegah peristiwa ini terulang Kembali adalah dengan mempertahankan ideologi Pancasila. Sebagai negara hukum yang berdasarkan kepada Pancasila tidak mengenal adanya pemisahan antara agama dan negara. Maka tidak ada tempat untuk paham yang dapat memisahkan antara negara dan agama. karena itu paham komunis ini sangat tidak tepat untuk ditumbuhkan di negara Indonesia. Namun, apabila komunis ingin tumbuh di negara Indonesia maka ia harus mengganti ideologi negara, dimana yang semulanya kita memakai ideologi Pancasila lalu digantikan oleh ideologi komunis (Soemarsono, M. 2007).

Kenyataannya usaha tersebut sia sia, karena mengingat upaya pemberontakan yang dilakukan oleh PKI untuk menggantikan Pancasila selalu berujung kegagalan, dimana puncaknya pada tanggal 30 September 1965 yang menewaskan enam Jenderal Indonesia. Dalam upaya memberantas komunis di Indonesia, pemerintah melakukan pembersihan politik dari campur tangan komunis. Pemimpin-pemimpin militer yang diduga sebagai simpatisan PKI dicabut jabatannya. MPRS dan kabinet 100 orang menteri dibersihkan dari pendukung-pendukung Soekarno (Alkostar, A. 2009).

Pemimpin-pemimpin PKI segera ditangkap dan dibunuh saat penangkapan, sisanya dihukum mati melalui persidangan pura-pura untuk konsumsi HAM Internasional. Selanjutnya, dengan pembersihan anggota PKI di wilayah Indonesia. Di era saat ini, pemerintah melakukan pencegahan terhadap komunisme dilaksanakan dengan cara mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sejak dini. Agar generasi penerus Indonesia dapat mengamalkan isi dari Pancasila, memiliki jiwa patriotisme yang tinggi, serta tidak memiliki ideologi komunis yang dapat menggantikan ideologi Pancasila (Hatama, D. A. G. P. 2022).

4. SIMPULAN

G30S-PKI adalah singkatan dari Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia, sebuah peristiwa sejarah yang terjadi di Indonesia pada tahun 1965 yang mengakibatkan gugurnya enam jenderal serta satu orang perwira pertama militer Indonesia dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Peristiwa ini melibatkan kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan dimulainya kampanye anti-komunis yang sangat brutal. Faktor-faktor yang menjadi penyebab mengapa G30S-PKI terjadi, diantaranya: (1) Dominasi ideologi Nasakom, (2) Pertentangan antara PKI dan TNI, (3) Keterlibatan pihak Amerika Serikat, (4) Kejadian di Lubang Buaya, (5) Propaganda anti-PKI, (6) Ketidakstabilan politik, (7) Keterlibatan intelijen asing, (8) Kegagalan penyidikan independen, (9) Kekerasan massal, (10) Pengaruh agama. Sebagai negara hukum yang berdasarkan kepada Pancasila tidak mengenal adanya pemisahan

antara agama dan negara. Maka tidak ada tempat untuk paham yang dapat memisahkan antara negara dan agama. karena itu paham komunis ini sangat tidak tepat untuk ditumbuhkan di negara indonesia. Pemimpin-pemimpin PKI segera ditangkap dan dibunuh saat penangkapan, sisanya dihukum mati melalui persidangan pura-pura untuk konsumsi HAM Internasional. Selanjutnya, dengan pembersihan anggota PKI di wilayah Indonesia. Di era saat ini, pemerintah melakukan pencegahan terhadap komunisme dilaksanakan dengan cara mengaktualisasikan nilai- nilai pancasila ke dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sejak dini.

5. REFERENSI

- Adriyanto, A. (2016). Kontroversi Keterlibatan Soeharto Dalam Penumpasan G30S/Pki 1965. *Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah*, 2(2), 1-12.
- Alkostar, A. (2009). Korelasi korupsi politik dengan hukum dan pemerintahan di negara modern (Telaah tentang praktik korupsi politik dan penanggulangannya). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.
- Anggriani, J. (2017). *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hatama, D. A. G. P. (2022). PERKEMBANGAN KOMUNISME DI INDONESIA TAHUN 1914-1927. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO*, 7(1), 57-72.
- Ikhsan A.F. dan Diyah A.K. (2018) Bab. I. V. Inong Balee Mencari Keadilan: Khairunnisa Rusli di antara Perjuangan Politik dan Perjuangan Perempuan. *KELUAR DARI EKSTREMISME*, 103.
- Kasalang, R. J. (2012). Tanggung jawab negara dalam memenuhi hak masyarakat atas air, dalam to promote: Membaca perkembangan wacana hak asasi manusia di Indonesia. Yogyakarta: Pusham UII.
- Khatami, M. I., & Kurnia, N. (2022). E-Demokrasi pada Perdebatan Publik di Twitter: Analisis Konten Polemik Pemecatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Jurnal Riset Komunikasi*, 5(1), 51-69.
- Nazra, E. R. C., & Darmawan, B. (2023). Mengenang Djamaluddin Wak Ketok: Komandan Batalyon Bazooka di PRRI Padang 1958-1961. *Istoria: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari*, 7(2), 1-8.
- Patra, H., Anatona, A., & Narny, Y. (2022). Pengawasan Orde Baru Terhadap Eks-Tahanan Politik PKI Di Sumatera Barat. *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 11(1), 54-70.
- Permata, H. (2015). Gerakan 30 September 1965 dalam Perspektif Filsafat Sejarah Marxisme. *Jurnal Filsafat*, 25(2), 220-251.
- Pratama, F. Y. Kritik Peristiwa 30 September 1965 dan Implikasinya dalam Pembangunan Pendidikan ke Arah Kedewasaan bagi Masyarakat Indonesia 1.
- Setyahadi, M. M. (2018). Analisis Konflik Politik Elite TNI Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966). *Jurnal Renaissance*, 3(01), 346-357.
- Setyonugroho, E. A. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Blunder Politik Soekarno.
- Sidqi, S. Y. N. (2008). Anomali Sistem Presidensial Indonesia (Evaluasi Praktek Politik Parlemenarian). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 15(1).
- Soemarsono, M. (2007). Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(2), 300-322.
- Wiharyanto, K. (2010). Proses Berdirinya ASEAN. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 1(1).